

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.". Pelaporan keuangan desa menjadi aspek kritis dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang otonom. Sebagai entitas administratif paling dasar di tingkat lokal, desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel (Pasal 27 Undang-undang nomor 6 tahun 2014). Praktik pelaporan keuangan desa tidak hanya mencerminkan kewajiban formal, tetapi juga merupakan cermin dari kesehatan keuangan dan integritas pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Peran sistem akuntansi desa, kualitas perangkat desa, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu dalam mencapai praktik pelaporan keuangan desa yang optimal.

Tabel 1. 1 Data Alokasi Dana Desa kecamatan Taggulangin Kabupaten Sidoarjo 2024

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa
1	Banjar Asri	Rp 885.824.000
2	Banjar Panji	Rp 837.604.000
3	Boro	Rp 950.674.000
4	Ganggang Pajang	Rp 1.110.383.000
5	Gempol Sari	Rp 1.054.074.000

6	Kalidawir	Rp	1.024.947.000
7	Kalisampurno	Rp	1.046.165.000
8	Kalitengah	Rp	1.488.988.000
9	Kedensari	Rp	1.038.273.000
10	Kedung Banteng	Rp	841.848.000
11	Ketapang	Rp	746.379.000
12	Ketegan	Rp	992.061.000
13	Kludan	Rp	924.855.000
14	Ngaban	Rp	845.159.000
15	Penatarsewu	Rp	879.252.000
16	Putat	Rp	961.069.000
17	Randegan	Rp	970.925.000
18	Sentul	Rp	1.095.365.000

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023

Desa mendapatkan rata-rata sekitar 700 Juta sampai 1 Miliar Rupiah, hal tersebut ditentukan oleh Kementerian Keuangan pada PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Banyak sekali fenomena penyalahgunaan APBDes yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan desa dapat menciptakan peluang untuk praktik korupsi. Jika informasi keuangan tidak tersedia secara terbuka, sulit bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk memantau penggunaan dana desa. Kurangnya sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan yang kuat dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Kondisi ini dapat terjadi jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa. Personel desa yang kurang terdidik atau kurang memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan dapat membuat kesalahan atau menjadi rentan terhadap praktek korupsi. Pendidikan

dan pelatihan yang kurang dapat memperburuk manajemen Hal tersebut mudah terjadi karena Fenomena buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuntut setiap pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan (Wisang dkk., 2023).

Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan ialah agar memudahkan para pemakai memahami informasi dari laporan keuangan tersebut (Hasliani & Yusuf, 2021). Laporan keuangan desa bukan sekadar kumpulan angka, melainkan jendela transparansi yang membuka akses masyarakat untuk memahami dan mengawasi dengan cermat bagaimana dana publik dikelola. Dalam cahaya laporan keuangan, terungkap pertanggungjawaban, memperkuat akuntabilitas, dan membangun fondasi kepercayaan yang mendasar dalam tata kelola keuangan desa. Pentingnya integrasi Sistem Akuntansi Desa, Kualitas Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan demokratis. Ketiga elemen ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi praktik pelaporan keuangan desa yang lebih baik di Kabupaten Sidoarjo.

Sistem keuangan desa menjadi pondasi utama dalam mengelola dan merekam transaksi keuangan di tingkat lokal. Didalam pengelolaan dana desa perlu adanya pencatatan sistem akuntansi yang efektif(Amanah dkk., 2023). Sistem keuangan dalam pemerintahan desa bukan hanya sekadar alat

administratif, melainkan elemen kunci yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Sistem keuangan desa yang kuat tidak hanya merupakan fondasi untuk merekam transaksi keuangan, tetapi juga katalisator yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan praktik pelaporan keuangan desa. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Drucker, “Efektivitas dalam manajemen keuangan berasal dari pemanfaatan sumber daya dengan bijak dan transparan.” Oleh karena itu, pengaruh positif sistem keuangan desa dapat tercermin dalam keterbukaan dan akurasi laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin kompleksnya tuntutan keuangan desa dan tuntutan akan akuntabilitas, penting untuk memahami pengaruh sistem keuangan desa terhadap praktik pelaporan keuangan desa.

Sistem keuangan yang efektif sangat penting untuk kesehatan ekonomi suatu negara. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien tetapi juga untuk memastikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Mishkin & Eakins, 2023). Sistem keuangan desa yang terintegrasi dengan teknologi dapat memberikan dampak besar pada praktik pelaporan keuangan. Pemanfaatan perangkat lunak modern dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan desa. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam sistem keuangan desa dapat menjadi kunci untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem keuangan desa yang transparan dapat memfasilitasi praktik pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan jelas. Transparansi ini mencakup ketersediaan informasi keuangan untuk masyarakat, keterbukaan terkait anggaran dan pengeluaran, serta kemampuan untuk melacak dan

mengaudit transaksi dengan mudah. Sistem keuangan yang memberikan tingkat akuntabilitas yang tinggi, praktik pelaporan keuangan desa dapat menjadi lebih efektif dan dapat dipercaya. dengan adanya Sistem Keuangan Desa setiap informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan desa dalam hal ini harus memenuhi unsur memberikan manfaaat umpan balik (Pedro Wisang dkk., 2023).

Pengendalian internal laporan keuangan desa adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa disusun dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan sumber daya, serta pelaksanaan pengawasan yang ketat, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang kuat di desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat bergantung pada sistem pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern laporan keuangan desa merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem pengendalian intern yang kuat dapat mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengendalian intern yang baik memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa tercatat dengan akurat dan dapat ditelusuri. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak berkepentingan

lainnya. Sistem pengendalian intern membantu pemerintah desa mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk menghindari sanksi dan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan hukum. Adanya pengendalian intern yang memadai, peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat diminimalkan. Prosedur pengawasan yang ketat membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Pengendalian intern yang efektif menjamin bahwa laporan keuangan desa disusun secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Keandalan laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis data oleh pemerintah desa dan pihak berkepentingan lainnya.

Transparansi laporan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas, tetapi juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan desa (Kusumastuti & Sari, 2022).. Meskipun terdapat berbagai tantangan, dengan komitmen dan upaya bersama, transparansi dalam laporan keuangan desa dapat diwujudkan. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas, mengadopsi teknologi yang relevan, dan mendorong budaya transparansi untuk mencapai tujuan ini. Transparansi laporan keuangan desa merupakan komponen krusial dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi desa dijelaskan sebagai, "Kemampuan pemerintah desa untuk menyajikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai semua aspek keuangan desa, sehingga setiap warga desa dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa."

(Suharto, 2019). Peningkatan transparansi dalam laporan keuangan desa bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, memastikan akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Transparansi laporan keuangan mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas setiap pengeluaran dan penerimaan. Akuntabilitas ini memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menghindari penyalahgunaan. Menyajikan laporan keuangan yang transparan, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat. Warga desa dapat melihat secara langsung bagaimana dana desa dikelola dan digunakan, sehingga meningkatkan rasa percaya terhadap aparat desa. Informasi keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat dan pihak berwenang untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Pengendalian intern juga dapat lebih mudah dilakukan jika semua transaksi keuangan tercatat dan dilaporkan dengan jelas. Laporan keuangan yang transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika warga dapat melihat bagaimana dana digunakan dan bagaimana keputusan keuangan diambil, mereka lebih cenderung mempercayai bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan bersama.

Beberapa hal mengenai perbedaan penelitian yang sekarang dan penelitian yang terdahulu adalah variabel yang diukur dalam penelitian, termasuk definisi dan operasionalisasi variabel, dapat bervariasi. Perbedaan ini dapat menghasilkan temuan yang berbeda atau menekankan aspek-aspek tertentu dari pengaruh Sistem Akuntansi Desa, Pengendalian Internal dari masing-masing

desa, dan Transparansi dari tiap desa terhadap Praktik Pelaporan Keuangan Desa. Penelitian dapat dilakukan dalam konteks dan lokasi yang berbeda. Perbedaan dalam konteks dan lokasi dapat mempengaruhi hasil penelitian karena perbedaan dalam kebijakan pemerintah, struktur akuntansi desa, atau tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian dapat dilakukan pada periode waktu yang berbeda. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, perubahan sistem akuntansi desa, atau perubahan tingkat partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Riset ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman pengaruh sistem akuntansi, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat, dapat diidentifikasi cara untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Memahami pengaruh sistem akuntansi desa dapat membantu dalam perbaikan atau peningkatan sistem tersebut. Identifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem dapat menjadi dasar untuk pengembangan atau peningkatan sistem akuntansi yang lebih baik. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa adalah langkah menuju pemberdayaan. Riset ini dapat membantu memahami seberapa jauh partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Perincian pengaruh Sistem Akuntansi Desa, Kebijakan Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat, riset ini dapat memberikan pandangan yang holistik dan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik

pelaporan keuangan desa, membantu menciptakan perubahan positif, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian tentang pengaruh sistem keuangan desa, pengendalian internal, dan transparansi terhadap laporan keuangan desa sangat relevan dan penting. Ini didorong oleh fenomena peningkatan dana desa, kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta temuan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan pentingnya ketiga elemen ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga praktis dengan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Studi komprehensif yang menggabungkan ketiga elemen ini masih terbatas, sehingga ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam dan holistik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Desa, Pengendalian Intern dan Transparansi Terhadap Praktik Pelaporan Keuangan Desa” diharapkan dapat memberikan penelitian dapat memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mengkaji dan mengubah kebijakan yang mungkin menghambat praktik pelaporan keuangan desa. Diharapkan ada respons positif dalam mendukung praktik yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Melalui langkah-langkah perbaikan ini, desa dapat membuka pintu untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan pengelolaan keuangan yang benar dan jujur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem Keuangan Desa dan sejauh mana efektivitasnya dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan desa?
2. Apakah pengendalian internal keuangan desa dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang dilaporkan?
3. Apakah transparansi dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi sejauh mana Sistem Akuntansi Desa memengaruhi kualitas pelaporan keuangan desa.
2. Menentukan pengaruh pengendalian internal keuangan desa terhadap kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.
3. Menganalisis sejauh mana transparansi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara Sistem Akuntansi Desa, Pengendalian Internal, dan Transparansi dalam praktik pelaporan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang lebih kuat terkait faktor-faktor ini.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori seperti teori desentralisasi fiskal, teori *agency*, *Asymmetric Information Theory*. Konsep yang lebih relevan terkait tata kelola keuangan desa. Menganalisis interaksi kompleks antara Sistem Akuntansi Desa, Pengendalian Internal, dan Transparansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga pada literatur akademis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian. Pemerintah desa dapat menggunakan temuan untuk membentuk kebijakan yang mendukung praktik pelaporan keuangan yang lebih baik dan lebih akuntabel.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan partisipasi, masyarakat dapat aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan pengawasan keuangan desa.